

**INTERNALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA MADYA
PEMATANG SIANTAR**

**(SUATU PROGRAM REKAYASA SOSIAL PERMUKIMAN KUMUH
DI KELURAHAN TANJUNG PINGGIR KECAMATAN MARTOBA)**

***INTERNALIZATION OF COMMUNITY EMPOWERMENT IN IMPROVING THE
QUALITY OF SLUMS IN MADYA CITY, PEMATANG SIANTAR
(A SLUM SOCIAL ENGINEERING PROGRAM
IN KELURAHAN TANJUNG PINGGIR, KECAMATAN MARTOBA)***

¹Rita Vinolia Aruan, ²Nelly Marina Rawaty Sinaga

¹ *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darma Agung Medan*

² *Fakultas Pertanian Universitas Darma Agung Medan*

email :¹ vinoliarita@gmail.com ² sinaganelly@gmail.com

ABSTRACT

Slums are considered as parts of the town were very unproductive, dirty, do not have the potential, not efficient and unobtrusive aesthetics and beauty, where slums are often regarded as the emergence of a variety of deviant behavior, such as crime and other social ills sources. But behind it all, let us look at some areas that initially slum turned into a environmentally friendly, clean, and beautiful. Various programs have been implemented properly, people are still expected to perform management and maintenance of the environment through pure consciousness in various forms of participation. Enterprises utilizing, foster, and preserve the natural surroundings is a positive effort in improving the quality of housing environment, because if not so then the environment will be back to slum areas. The community empowerment must still be done to maintain, improve, in order to perform maintenance of environmental quality at least equal, or, if feasible quality increases with the active participation of citizens. The success of community empowerment in the management and maintenance of settlements can be seen from the efforts undertaken, such as optimizing the function and role of institutions of formal and non-formal, define and regulate the rights, obligations and responsibilities of citizens, organize and menyelenggarakan allocation, use, supply, maintenance of land and water, and the potential of the natural environment in improving the quality of settlement environment.

Key words: *Internalization, Community, Improving, Slums*

ABSTRAK

Permukiman kumuh dianggap sebagai bagian wilayah kota yang sangat tidak produktif, kotor, tidak memiliki potensi, tidak efisien dan mengganggu estetika serta keindahan, keberadaan permukiman kumuh seringkali dianggap sebagai sumber timbulnya berbagai perilaku menyimpang, seperti kejahatan, dan sumber penyakit sosial lainnya. Namun dibalik itu semua, coba kita lihat beberapa daerah yang awalnya permukiman kumuh berubah menjadi tempat yang ramah lingkungan, bersih, dan asri. Pemberdayaan masyarakat harus tetap dilakukan untuk menjaga, memperbaiki, sampai melakukan pemeliharaan agar kualitas lingkungan minimal sama, atau bila dimungkinkan kualitasnya meningkat dengan adanya partisipasi aktif dari warga masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan permukiman dapat dilihat dari usaha-usaha yang dilakukan, seperti mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga-lembaga formal dan non-formal, menentukan dan mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab warga, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan, pemeliharaan lahan dan air, dan potensi alam lingkungan dalam peningkatan kualitas lingkungan permukimannya.

Kata kunci: *Internalisasi, Pemberdayaan, Masyarakat, Permukiman, Kumuh*

PENDAHULUAN

Penanganan masalah lingkungan permukiman kumuh tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus merupakan upaya terpadu yang saling mendukung dan bersinergi dari berbagai pihak terkait dalam mencapai sasaran yang optimal. Perlu ada kesamaan persepsi dalam penetapan sasaran, langkah dan waktu yang tepat untuk mengimplementasikannya, dalam hal ini peran pemerintah sangat vital sebagai fasilitator dan pemberdaya dari semua tindakan yang akan diambil.

Salah satu isu permasalahan perkotaan adalah pada Bidang Struktur Ruang Kota, dimana banyaknya permukiman kumuh yang tidak tertangani. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang, lemahnya kemampuan pengawasan dan pengendalian pembangunan, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, lemahnya penegakan hukum, kemiskinan, serta belum terciptanya semangat dan mekanisme kerjasama lintas wilayah dalam pembangunan yang sinergis.

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan menggunakan berbagai pola-pola pendekatan yang bersifat holistik. Perbaikan kualitas lingkungan permukiman yang pernah dilakukan diantaranya adalah: pemugaran rumah, bantuan teknik, rumah contoh, perbaikan kampung yang meliputi prasarana jalan dan saluran, perbaikan sanitasi dan penyediaan sarana MCK. Program ini didukung konsep asas tri daya, yaitu pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran maupun kemampuan diri sendiri untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Berbagai isu di atas juga diduga terjadi di Kota Pematang Siantar mengingat kota tersebut sudah beberapa kali berhasil meraih Anugerah Adipura. Namun pendekatan yang dilakukan belum optimal, lebih banyak bersifat sektoral dan tidak terintegrasi sehingga menyebabkan kawasan yang telah tertangani berpotensi menjadi kumuh kembali dan secara bertahap terjadi pengurangan kualitas lingkungan atas kawasan tersebut.

Berdasarkan pra penelitian yang kami tinjau Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Martoba merupakan daerah kumuh dimana legalitas tempat tidak ada. Daerah ini merupakan garapan dari PTPN III. Tidak hanya tempat yang kumuh tetapi juga sumber daya manusia dengan akhlak yang rendah dibuktikan dengan menjamurnya Pekerja Seks Komersial (PSK) dan cafe remang-remang. Hal itu menjadi sangat miris

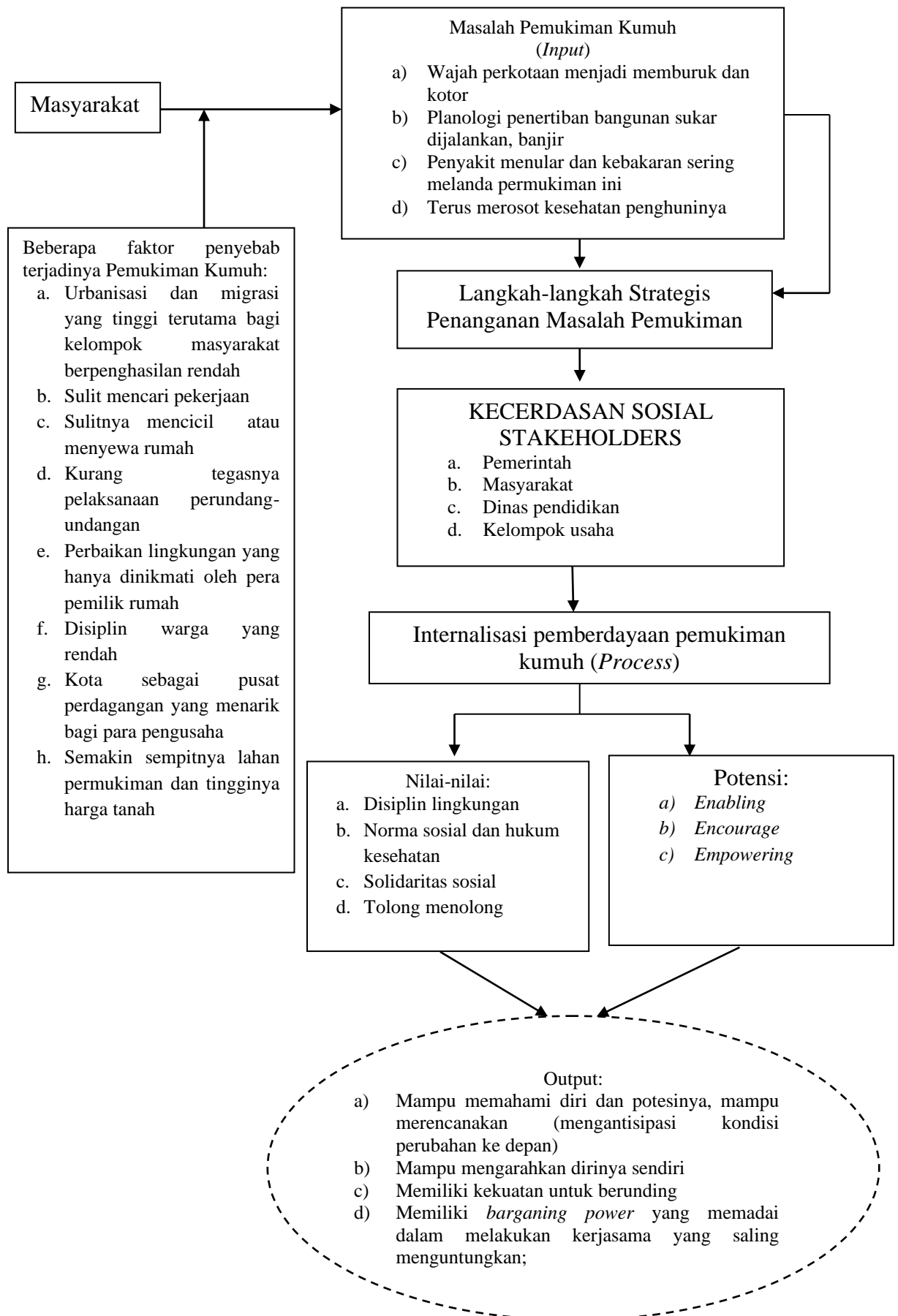
ketika di lokasi tersebut terdapat tempat ibadah, Kantor Dinas kebersihan dan kampus. Kemiskinan menjadi faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut menjadi rumit.

Kelurahan Tanjung Pinggir adalah tempat pembuangan sampah akhir yang berasal dari berbagai daerah Kabupaten Simalungun. Penduduk setempat memanfaatkan TPA sebagai mata pencaharian mereka untuk memulung sampah. Sedangkan wanita berprofesi sebagai PSK menjajakan dirinya secara terang-terangan di pinggir pasar pada sore hari. Hal ini dapat berdampak buruk kepada tumbuh kembang anak.

Melihat latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian dalam mengatasi permasalahan tersebut, sehingga diperlukan kajian dan telaah pemberdayaan masyarakat secara mendalam dengan tujuan khusus untuk menemukan kembali pola-pola pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh di Kecamatan Martoba Kelurahan Tanjung Pinggir Kota Madya Pematang Siantar. Sementara itu sasarannya adalah masyarakat sehingga dapat memahami dan mampu melakukan pemberdayaan secara mandiri. Kurniasih (2007), mengatakan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non-teknis. Suatu permukiman dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari kemiskinan, karena pada umumnya di permukiman kumuhlah masyarakat miskin tinggal dan banyak kita jumpai di kawasan perkotaan.

Permukiman kumuh umumnya di pusat-pusat perdagangan, seperti pasar kota, perkampungan pinggir kota, dan di sekitar bantaran sungai kota. Kepadatan penduduk di daerah-daerah ini cenderung semakin meningkat dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan asal daerah. Perhatian utama pada penghuni permukiman ini adalah kerja keras mencari nafkah atau hanya sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari agar tetap bertahan hidup, dan bahkan tidak sedikit warga setempat yang menjadi pengangguran. Konsep berpikir internalisasi Pemberdayaan Pemukiman Kumuh dapat dilihat dari bagan di bawah ini.

Bagan 1. Kerangka Konsep Internalisasi Pemberdayaan Pemukiman kumuh



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono,2011:286).

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Martoba Kota Madya Pematang Siantar. Penentuan daerah penelitian dilakukan secara purposive (sengaja) dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan salah tempat kumuh yang paling komplit, mulai dari lokasi, sumber daya manusia hingga sampai pendirian bangunan yang tidak mempunyai legalitas hukum. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2020. Penentuan sumber data pada responden yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono,2011:299). Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu non probability sampling yaitu sampling incidental.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Martoba

Kecamatan Siantar Martoba merupakan salah satu kecamatan dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kota Pematangsiantar. Berdasarkan kondisi secara geografis dapat dikatakan bahwa Kecamatan siantar Martoba adalah wilayah yang tingkat kesuburan tanahnya cukup baik serta dilalui oleh 4 sungai, yaitu Sungai Bahapal, Sungai Bahkaitan, Sungai Bah Silobong dan Sungai Bah Sosopan sehingga cocok untuk pertanian. Secara Global, tanah di Kecamatan Siantar Martoba terdapat 3 jenis yaitu, Lahan Persawahan, Lahan Bukan Persawahan seperti ladang, pekarangan dan lain –lain, dan Lahan Bukan Pertanian seperti kawasan permukiman, kawasan perdagangan, dan kawasan industri.

B. Langkah-Langkah Internalisasi Pemberdayaan Permukiman Kumuh

Usaha peningkatan kualitas hidup meliputi (1) mensosialisasikan dan memfasilitasi program peningkatan kualitas lingkungan permukiman, (2) melakukan penyusunan data base permukiman kumuh tingkat kabupaten dan kota (3) melakukan evaluasi proses pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, serta efektifitas program peningkatan kualitas lingkungan, (4) serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan

peningkatan kualitas lingkungan dan konsultan pendamping. (Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Lingkungan Propinsi Bali 2004).

Adanya swadaya masyarakat pada pelaksanaan kegiatan fisik merupakan partisipasi riil dari masyarakat terhadap program peningkatan kualitas lingkungan ke arah mandiri melalui program pendampingan masyarakat. Program ini memerlukan penunjukkan tenaga pendamping masyarakat, yang sebaiknya dipilih oleh masyarakat. Konsep penanganan program peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, meliputi pemberdayaan sosial masyarakat, pemberdayaan usaha, serta pemberdayaan prasarana dan sarana lingkungan.

Ketiga aspek tersebut merupakan suatu proses peningkatan kemampuan, penggalian sumberdaya lokal, serta pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku utama dalam peningkatan kualitas lingkungannya secara mandiri. Peran tersebut dapat dilihat dalam berbagai usaha penanganan lingkungan permukiman kumuh, diantaranya perbaikan kampung, bantuan penataan, perbaikan dan rehabilitasi kawasan kumuh, peremajaan lingkungan, dan perbaikan lingkungan. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat pada kegiatan usaha ekonomi produktif dapat didekati dari potensi usaha ekonomi yang berkembang di masyarakat dengan merangkum aspirasi masyarakat tentang berbagai upaya pengembangan usaha ekonomi lokal.

Pengembangan peran aktif masyarakat melalui kegiatan swadaya pada setiap pelaksanaan pembangunan akan lebih mudah pada masyarakat seperti ini. Hal ini perlu disadari dalam upaya pengembangan usaha masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas lingkungan permukiman sehingga sesuai dengan potensi usaha dan kelompok usaha kecil masyarakat yang sudah ada baik dari sektor primer, sekunder maupun tersier.

Selanjutnya, program kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebesar-besarnya dilakukan untuk mendukung usaha-usaha masyarakat, menumbuhkan usaha produktif masyarakat, menyediakan prasarana dan sarana pengembangan usaha, serta meningkatkan sikap pengabdian dan loyalitas pada perbaikan lingkungan. Pemberdayaan prasarana dan sarana lingkungan melalui pendayagunaan, yang berintikan kegiatan pelaksanaan pembangunan perumahan, prasarana dan sarana, dijaga keterkaitannya dengan lingkungan sekitar. Program kegiatannya meliputi penataan kawasan permukiman, perbaikan lingkungan perumahan swadaya, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana dasar permukiman, yang mencakup perbaikan jalan

lingkungan, jalan setapak, drainase, penyediaan air bersih, sanitasi dan penanganan persampahan.

Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh berarti bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat agar mau turut serta ambil bagian dalam berbagai kegiatan dalam peningkatan kualitas lingkungannya.

Usaha pemberdayaan masyarakat adalah dengan mendorong masyarakat untuk mandiri serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, prakarsa sendiri, dan memperbaiki hidupnya sendiri. Keterlibatannya, dapat berupa aktivitas dalam wujud sumbangan pikiran, pendapat maupun tindakan, dapat pula berupa urun biaya, material untuk perbaikan lingkungannya. Pada hakekatnya pemberdayaan dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam 5 tahap kegiatan, yaitu kegiatan dalam pengambilan inisiatif, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan permukiman.

Pertama, pada tahap pengambilan inisiatif dimana masyarakat dikenalkan terhadap pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang mempunyai tujuan meningkatkan potensi masyarakat. Pada tahap ini masyarakat diberikan penyadaran, dorongan, motivasi, kesempatan termasuk pula kewenangan yang sifatnya sesuai dengan fungsi dan perannya. Selanjutnya dikenalkan berbagai permasalahan yang dihadapi di lingkungan permukimannya, sehingga dari pemahaman mereka dapat memunculkan berbagai ide maupun gagasan yang positif, karena tanpa pemahaman permasalahan biasanya kesulitan dalam memunculkan inisiatif.

Peran pemimpin atau penguasa desa dinas maupun adat sangat potensial dalam mengambil inisiatif, karena punya wewenang dan kemampuan dalam menggerakkan masyarakat di lingkungan desanya. Pengambilan inisiatif ini tidak hanya oleh orang yang berkuasa, akan tetapi dapat pula dilakukan oleh perorangan, kelompok orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat termasuk lembaga pemerintahan yang bersifat adat dan atau dinas.

Kedua, Sebagaimana kita ketahui perencanaan suatu lingkungan permukiman sangatlah kompleks, meliputi perencanaan ruang fisik (*spatial*) dan non-ruang (*aspatial*). Perencanaan ruang fisik berupa berbagai wujud rumah, perumahan, sarana dan prasarana lingkungan permukiman. Perencanaan non- ruang dalam wujud

idealisme, aspirasi, sikap perilaku dari berbagai kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat yang serbaneka.

Ketiga, pada tahap pelaksanaan peningkatan kualitas lingkungan permukiman, masyarakat dapat berperan dalam berbagai bidang, misalnya dalam penyediaan lahan, bahan bangunan, tenaga kerja, menjaga ketertiban, keamanan dan sebagainya. Masyarakat dapat mengambil kesempatan dan pengalaman dimana perlu diperhatikan fungsi dan peran masyarakat termasuk prosedur- prosedur yang harus dipatuhi agar tidak terjadi konflik, karena hasilnya untuk masyarakat itu sendiri.(Santosa ,1988)

Keempat, program peningkatan kualitas lingkungan permukiman sering kita jumpai berupa program perbaikan menyangkut hal-hal yang bersifat dinas dan adat. Perbaikan yang bersifat dinas, misalnya perbaikan jalan, riol, kantor desa, sekolah, puskesmas maupun pasar desa. Sedangkan perbaikan yang bersifat adat, misalnya perbaikan bangunan pura, perbaikan jalur prosesi ritual, perbaikan tempat-tempat yang disucikan dan sebagainya.

Peran serta tokoh atau pemimpin masyarakat dapat memerankan fungsi tersebut karena mereka memiliki wewenang untuk mengatur masyarakatnya. Pemimpin masyarakat dapat dikonsepsikan sebagai pihak yang berkompeten dan memiliki fungsi keperantaraan antara pemilik program peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan pelaksana dan masyarakat. Pemberdayaan disini dikaitkan dengan pemberian petunjuk-petunjuk terhadap kekeliruan dalam pelaksanaan rencana atau merupakan perbaikan dari rencana semula. Masyarakat yang terlibat langsung dalam pengawasan dapat merinci bagian-bagian yang harus disesuaikan dengan rencana. Pada tahap evaluasi dalam penataan lingkungan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sudah tentu terdapat kesesuaian, ketidaksesuaian, kekeliruan dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya.

Kelima, pada tahap pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan permukiman merupakan hal yang sangat urgen dilakukan oleh warga masyarakatnya. Keberhasilan pengelolaan lingkungan permukiman sangat dipengaruhi oleh aktivitas warga yang bersifat membina, membangun dan mengembangkan lingkungannya.

KESIMPULAN

Berbagai program yang telah dilaksanakan dengan baik, masyarakat tetap diharapkan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan lingkungannya melalui kesadaran murni dalam berbagai bentuk partisipasi. Usaha memanfaatkan, membina, dan melestarikan alam lingkungan sekitarnya merupakan usaha positif dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman, sebab kalau tidak demikian maka lingkungan akan segera kembali menjadi lingkungan permukiman kumuh.

Pemberdayaan masyarakat harus tetap dilakukan untuk menjaga, memperbaiki, sampai melakukan pemeliharaan agar kualitas lingkungan minimal sama, atau bila dimungkinkan kualitasnya meningkat dengan adanya partisipasi aktif dari warga masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan permukiman dapat dilihat dari usaha- usaha yang dilakukan, seperti mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga-lembaga formal dan non- formal, menentukan dan mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab warga, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan, pemeliharaan lahan dan air, dan potensi alam lingkungan dalam peningkatan kualitas lingkungan permukimannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada dana hibah Strategis Nasional (DP2M) Dikti Tahun 2020 yang telah memberikan dana penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Denpasar: *Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Proyek Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman Bali*. Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Lingkungan Propinsi Bali.
- Djemabut Blaang (Penyunting). 1986, *Perumahan dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Djoko Sidik Pramono, 2003. *Prospek Penyelenggaraan Transmigrasi di Masa depan. Makalah Seminar Menyongsong Transmigrasi 2010*. Dep.Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Eko Budhiharjo, Ir. M.Sc.1986. *Arsitektur dan Kota di Indonesi*.Yogyakarta.
- Fox, William F.1994, *Strategic Options for Urban Infrastructure Management*. Washington USA: The International Bank for Reconstruction and Development.
- Hasibuan, M. 2003. *Organisasi dan Motivasi : Dasar Peningkatan Produktifitas* (Cetakan ke-empat) , Jakarta, Bumi Aksara.

- Lufti Nasution, 1995. Kebijakan Pertanahan. Prosiding Kongres Nasional Himpunan Ilmu Tanah Indonesia VI, Jakarta.
- Kirmanto, Djoko, Ir,Dipl.HE, Semiloka Rencana Pencanangan Gerakan Nasional Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh, Palembang 20-21 Agustus, 2001
- Makeham dan Malcolm, 1989. *The economic of tropical Farm Management*. Canbride University, Press London.
- Narada Karya, CV. 2004, *Konsultan Managemen Wilayah Propinsi Bali*.
- Nasoetion, L.I.1999. Pendekatan Agropolitan Dalam Rangka Penerapan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
- Posman Sibuea, 2000. *Corporate Farming Modernisasi Pertanian, dan Ketahanan Pangan, Reuni Hari Pangan* , dalam Kompas Edisi 16 Oktober 2000.
- Pitana, I Gede (editor). 1994. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Percetakan Offset Bali Post,
- Swarsi, Si Luh. 1986. *Sistem Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Bali*. Denpasar.
- Suharto, Edi.Ph.d, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Suhartini,Rr,dkk, *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*, Jogjakarta: Pustaka Pesantren,2005.
- Surpha I Wayan, S.H. 2002. *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Denpasar: PT. Offset BP,.